

Berita : Pengelolaan Subsidi Masih Bermasalah

Entitas / Cakupan : BPK

Sumber / Hal : Koran Tempo / Hal.18

Edisi : Rabu, 3 Oktober 2018

Pengelolaan Subsidi Masih Bermasalah

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan melansir, sepanjang tahun lalu, ada potensi kerugian negara sebesar Rp 11,55 triliun. Dari angka tersebut, pelanggaran terbesar disebabkan pembukuan yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan, terutama pada pengelolaan subsidi atau kewajiban pelayanan publik.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, pada semester I 2018 ini, auditornya melakukan koreksi negatif penyaluran subsidi sebesar Rp 2,99 triliun. Koreksi dilakukan setelah pemeriksaan terhadap 10 obyek multiprogram di 11 entitas, dari subsidi energi, pupuk, hingga layanan kesehatan. "Koreksi positifnya hanya Rp 115,10 miliar," kata Moermahadi di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Dengan begitu, pemeriksaan BPK telah menghemat pengeluaran negara untuk subsidi sebesar Rp 2,88 triliun, dari semula Rp 151,28 triliun menjadi Rp 148,40 triliun. Hasil pemeriksaan mengungkap 94 temuan yang memuat 131 permasalahan, terutama pada subsidi beras sejahtera, penyaluran bahan bakar

penugasan pemerintah, dan listrik.

Moermahadi mengatakan penerabasan berbagai acuan tata kelola keuangan negara menyebabkan efek domino. Di sektor energi, misalnya, upaya menyediakan listrik yang murah bagi masyarakat telah membebani PT PLN (Persero) sebesar Rp 7,46 triliun. Beban tersebut berasal dari biaya pokok penyediaan listrik untuk golongan nonsubsidi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif jual.

Hal serupa terjadi pada kebijakan penyediaan bahan bakar minyak. Penetapan harga jual eceran untuk solar atau biosolar dan bahan bakar khusus penugasan 2017 lebih rendah dari formulasi normal. Walhasil, ada taksiran penambahan beban pada PT Pertamina (Persero) dan PT AKR, masing-masing sebesar Rp 26,30 triliun dan Rp 259 miliar.

BPK juga mengungkap adanya penambahan anggaran subsidi listrik sebesar Rp 5,5 triliun yang dilakukan tanpa pencatatan pagu anggaran. Meski Kementerian Keuangan telah menanggapi temuan ini dengan memastikan adanya pengujian dalam tambahan subsidi tersebut, BPK berpendapat pemerintah tidak dapat

menyampaikan payung hukum pada kebijakan tersebut. "Meski begitu, ada juga temuan kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah sebesar Rp 2,4 triliun," kata Moermahadi.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka mengatakan beban biaya pokok penyediaan listrik memang fluktuatif. Karena itu, untuk mengakalinya, korporasi berupaya mencari pendanaan lain, seperti meluncurkan surat utang. Untuk tahun ini, perusahaan setrum negara tersebut sudah mengajukan permohonan pencatatan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap II dengan jumlah maksimal Rp 2,5 triliun. "Untuk menjaga agar biaya pokok penyediaan listrik tidak naik," ujarnya.

Meski begitu, pemerintah juga menyediakan dukungan kepada PLN dengan penyertaan modal. Tahun depan, pemerintah direncanakan memberikan suntikan langsung ke PLN sebesar Rp 6,5 triliun untuk menyokong program setrum negara.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan tambahan anggaran subsidi sebesar Rp 5,22 triliun tak hanya diperuntukkan bagi program subsidi. Menurut

dia, duit tersebut dialokasikan untuk menjaga neraca keuangan PLN tetap sehat. "Agar beban utang perusahaan tetap 1 persen," kata Askolani.

Pemerintah, kata dia, juga menjamin keuangan perusahaan penugasan lain, seperti Pertamina dalam menyalurkan BBM, meski harga minyak dunia sedang merangkak naik. Melansir data Kementerian Keuangan, bendahara negara sudah membayar tunggakan subsidi energi kepada Pertamina dan PLN sebesar Rp 17,6 triliun. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati pun menyatakan lega karena mendapat komitmen dari pemerintah atas piutang Rp 20 triliun.

● CAESAR AKBAR